

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Fenomena terkini yang masih menarik perhatian dunia khususnya bagi Indonesia salah satunya adalah perubahan iklim. Tidak menentunya cuaca serta kenaikan suhu yang tiap tahun nya terus meningkat ini disebabkan oleh pelepasan karbon. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika terjadi anomali suhu udara rata-rata pada Bulan September 2022, dimana dari 88 stasiun pengamatan yang dilakukan BMKG hasil umumnya menunjukkan nilai anomali positif (lebih panas dari rata-rata klimatologisnya) di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Emisi karbon adalah proses pelepasan bahan bakar fosil ke atmosfer bumi, dimana bahan bakar fosil terdiri dari minyak dan batubara (Asyifa & Burhany, 2022). *Carbon emission* merupakan satu komponen dari gas rumah kaca, dimana memiliki peranan penting dalam perubahan iklim. Emisi dari gas rumah kaca yang memiliki kontribusi cukup tinggi terhadap pemanasan global yaitu adanya pelepasan CO₂/karbondioksida yang berasal dari proses pembuatan bahan bakar minyak, batubara, dan bahan – bahan organik.

Carbon Emission Disclosure adalah suatu pengungkapan dalam mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan perusahaan kepada lingkungan yang tercantum dalam *Sustainability Report*. *Carbon Emission Disclosure* berarti suatu penjabaran sebagai upaya perusahaan untuk mengurangi dan mengendalikan emisi karbon, seperti melakukan perhitungan konsumsi energi, biaya lingkungan serta peraturan perusahaan terkait dengan penggunaan energi (Setiyawan, 2017).

Tabel 1. 1
Data Emisi Gas Rumah Kaca
menurut Jenis Sektor (juta ton CO₂e), 2010-2019

Tahun	Sektor						Jumlah
	Energi	IPPU	Pertanian	FOLU	Kebakaran Hutan	Limbah	
2010	453,2	36	108,3	73,3	51,4	87,7	810
2011	507,4	36	107,5	122,4	189	91,9	1.054,1
2012	540,4	40	112	249,4	207,1	95,5	1.244,6
2013	496	39,1	112,9	377,7	205,1	100,5	1.331,4
2014	531,1	47,5	112,8	215,3	499,4	102,8	1.509
2015	536,3	49,3	117,2	742,8	822,7	106,1	2.374,4
2016	538	55,3	122,2	417,4	90,3	112,4	1.335,5
2017	562,2	55,4	127,5	476	12,5	120,2	1.353,9
2018	595,7	59,3	110,1	602,2	121,3	127,1	1.615,6
2019	638,8	60,2	108,6	468,4	456,4	134,1	1.866,6

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2020

Dalam tabel 1.1 menunjukkan bahwa emisi karbon yang dilepaskan secara nasional dari *range* tahun 2010 – 2019 yang meliputi enam sektor yaitu, Energi, IPPU (*Industrial Process and Product Uses*), Pertanian, FOLU (*Forest and Other Land Uses*), Kebakaran Hutan, serta Limbah. Dalam sepuluh tahun pengamatan emisi GRK di Indonesia, pada tabel 1.1 menunjukkan sektor energi mendominasi dengan persentase diatas 40% dari sektor lainnya dalam menyumbang emisi karbon selama total 5 tahun (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020)

Di Indonesia sektor energi ini, menggantikan sektor kehutanan sebagai salah satu sektor yang menyumbang emisi karbon terbesar. Sektor energi dan transportasi mendominasi emisi dengan persentase sebesar 50,6% (potensi sebesar 1 Gigaton CO₂eq) dari total emisi di Indonesia pada tahun 2022. Potensi emisi akan terus meningkat hingga di tahun 2030, dimana persentase emisi dari sektor energi diprediksi akan menyentuh angka 1,4 Giga Ton CO₂eq (59%). Hal ini berasal dari kegiatan yang dilakukan pada sektor energi yang berupa pembangkit listrik, kilang minyak, dan produksi bahan bakar padat serta industri energi lainnya. Saat ini

Indonesia masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dalam kebijakan sektor ketenagalistrikan bagi masyarakat, dimana bahan bakar dari PLTU ini adalah batu bara yang paling berkontribusi dalam pelepasan karbon. Sama halnya dengan sektor transportasi dimana emisi dihasilkan dari penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor yang banyak mengeluarkan emisi gas rumah kaca ke atmosfer bumi. Dalam situs *Carbon Brief: Profil Carbon Brief: Indonesia*, “Indonesia merupakan negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia pada tahun 2015.” (Carbon Brief, 2019). Upaya yang dilakukan untuk membantu penurunan tingkat karbon, Indonesia meratifikasi adanya *Paris Agreement* dimana Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan tingkat emisi karbon sebesar 29-41% pada tahun 2030. Upaya yang dilakukan adalah membuat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Namun dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, tidak ada satupun peraturan yang mengacu pada kewajiban perusahaan agar dapat melaporkan emisi karbon nya kepada publik serta mempertanggungjawabkan emisi karbon yang dikeluarkan nya. Saat ini pengungkapan emisi karbon di Indonesia bersifat *voluntary* yang mana tidak semua perusahaan yang menghasilkan emisi karbon melaporkan nya ke publik (Pramuditya & Budiasih, 2020). Hal tersebut dapat dibuktikan oleh hasil penelitian Setiawan & Ridaryanto (2022) dari 250 perusahaan dari sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hanya 43 perusahaan yang melaporkan emisi karbon nya. Banyaknya peneliti seperti Amaliyah & Solikhah (2019); Pratama, (2021); Purnayuda N, (2022); Sari & Susanto, (2021); Setiawan, (2017); dan Trufvisa & Ardiyanto, (2019) yang melakukan penelitian mengenai pengungkapan karbon ini merupakan gambaran dari pentingnya pengungkapan emisi karbon bagi perusahaan.

Beberapa peneliti seperti Amaliyah & Solikhah (2019); Kurnia et al. (2020); Nur Farida & Sofyani (2018) masing-masing peneliti menggunakan berbagai faktor sebagai penentu *Carbon Emission Disclosure*. Berdasarkan saran dari peneliti terdahulu, dimana faktor - faktor yang dapat mempengaruhi *Carbon Emission Disclosure* salah satunya adalah mekanisme *Corporate Governance*, tingginya

pelepasan karbon yang dihasilkan dari sektor energi dapat dikendalikan dengan adanya proksi *Corporate Governance* (Agusiady et al., 2021). GCG akan mengarahkan serta mengendalikan kegiatan perusahaan sehingga akan tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. Serta mampu berkontribusi dalam menumbuhkan perusahaan yang bersih, juga menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan sekitar berdasarkan nilai-nilai sosial budaya yang tinggi. Dalam penelitian ini variabel GCG diproksikan dengan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit. Untuk variabel kepemilikan manajerial akan digantikan dengan mekanisme GCG yang lain yaitu kepemilikan asing. Seperti yang telah dijelaskan dalam penelitian Pramuditya & Budiasih (2020) bahwa kepemilikan asing memiliki persentase yang cukup tinggi dan jumlahnya signifikan jika dibandingkan dengan penanam modal yang berasal dari pihak manajemen. Persentase yang tinggi ini akan berpotensi pada pengungkapan emisi karbon, kepemilikan asing dinilai lebih peduli terhadap *Carbon Emission Disclosure* terlebih yang berasal dari negara maju.

Kepemilikan institusional adalah proksi dari tata kelola perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan pemegang saham perusahaan pemerintah, lembaga keuangan, badan hukum, lembaga di luar negeri, dana perwalian, dan lembaga lainnya. Kehadiran pihak institusi dalam perusahaan mampu mendorong pihak manajemen dalam hal pengungkapan *Carbon Emission Disclosure* sehingga dapat mengendalikan emisi karbon yang dilepaskan.

Selain kepemilikan institusional dalam proksi *Corporate Governance* lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepemilikan asing yaitu persentase kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh investor asing. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 “Kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang menanam modal di wilayah Negara Republik Indonesia”. Kepemilikan asing cenderung lebih peduli terhadap lingkungan terlebih investor yang berasal dari negara maju seperti Finlandia, Jepang, Canada dan lainnya, dimana negara tersebut telah diberlakukan nya pajak karbon. Sehingga kepemilikan asing dapat

turut serta mendorong pihak manajemen dalam melaporkan *Carbon Emission Disclosure* pada *Sustainability Report*.

Dalam menjalankan *Good Corporate Governance* sebuah perusahaan harus memiliki dewan komisaris independen. Dewan komisaris adalah bagian dari perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi, dalam manajemen dewan komisaris merupakan tingkatan tertinggi setelah pemegang saham. Dewan komisaris independen adalah seseorang yang tidak memiliki keterikatan dalam hal apapun dengan investor, direktur dan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur suatu perusahaan. Dewan komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada direksi perusahaan (Trufvisa & Ardiyanto, 2019). Pengawasan ini juga dapat diterapkan pada salah satu prinsip dari *Good Corporate Governance* yaitu *transparency*, dimana prinsip tersebut mewajibkan adanya pengungkapan informasi yang tepat waktu, jelas, dapat diperbandingkan dalam hal keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan yang berkaitan dengan kepemilikan perusahaan. Dimana semua aktivitas perusahaan harus dilaporkan termasuk pengungkapan emisi karbon.

Proksi yang terakhir yang tidak kalah penting adalah komite audit, komite audit merupakan pihak yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas melakukan pengawasan dalam hal pengelolaan perusahaan. Komite audit ini merupakan bagian dari mekanisme *Corporate Governance* yang keberadaannya diharapkan dapat melakukan suatu pengawasan yang baik bagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan. Proporsi dari komite audit ini dapat memonitor kinerja manajemen sehingga keberadaannya dapat meminimalisasi perilaku manajemen yang menyimpang (Aprilia, 2021). Serta dapat mendorong manajemen untuk mengungkapkan pelepasan karbon dalam laporan *sustainability report*.

Dari hasil penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa proksi kepemilikan institusional, kepemilikan asing serta komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *Carbon Emission Disclosure*, sedangkan komite audit berpengaruh positif terhadap *Carbon Emission Disclosure* menurut peneliti tingginya persentase yang dimiliki oleh kepemilikan institusional tidak dapat mempengaruhi pengungkapan emisi karbon yang dilakukan perusahaan (Pramuditya & Budiasih, 2020). Sedangkan menurut Amaliyah & Solikhah (2019)

kepemilikan institusional dan tingginya jumlah komite audit mampu memberikan pengaruh positif signifikan pada pengungkapan emisi karbon. Sejalan dengan teori stakeholder, dimana dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak institusi terhadap perusahaan akan meningkatkan keterbukaan informasi sehingga akan meningkatkan pula *carbon emission disclosure*. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga citra perusahaan dan meningkatkan kepercayaan para *shareholder* sehingga modal yang ditanamkan pada perusahaan akan tetap konsisten. Adanya inkonsistensi dari hasil penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk menguji kembali terkait pengaruh dari mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap *carbon emission disclosure*.

Untuk membedakan hasil penelitian, maka disini peneliti akan variabel yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu variabel kepemilikan asing yang merupakan proksi dari *Corporate Governance* yang berasal dari pihak ekstern dan peneliti mencoba mengambil sampel dari perusahaan sektor energi serta sektor transportasi & logistik yang terdaftar di BEI untuk tahun 2020-2022. Dimana penelitian sebelumnya mengambil sampel dari perusahaan non-keuangan dan hanya sektor pertambangan saja. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk menguji “Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap *Carbon Emission Disclosure* pada Perusahaan Sektor Energi serta Sektor Transportasi & Logistik yang Terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) Tahun 2020 -2022”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis membuat beberapa poin pertanyaan:

1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Carbon Emission Disclosure*?
2. Apakah Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap *Carbon Emission Disclosure*?
3. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Carbon Emission Disclosure*?
4. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Carbon Emission Disclosure*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui pengaruh dari kepemilikan institusional terhadap *carbon emission disclosure*
- b) Untuk mengetahui pengaruh dari kepemilikan asing terhadap *carbon emission disclosure*
- c) Untuk mengetahui pengaruh dari dewan komisaris independen terhadap *carbon emission disclosure*
- d) Untuk mengetahui pengaruh dari komite audit terhadap *carbon emission disclosure*

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain sebagai berikut:

1.3.2.1 Manfaat Praktis

1. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai alat analisis, bahan pertimbangan serta pengembangan ilmu akuntansi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan emisi karbon dengan menggunakan proksi *Corporate Governance*.
2. Diharapkan penelitian ini berguna bagi pengguna *annual report* serta pengguna *sustainability report* untuk kepentingan stakeholder dalam hal pengambilan keputusan yang bijaksana.
3. Diharapkan dengan tingginya pengungkapan emisi karbon dapat membantu meningkatkan keterbukaan informasi serta membantu upaya negara dalam hal pengendalian emisi karbon di Indonesia.

1.3.2.2 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, referensi serta masukan kepada pihak manajemen dalam mengambil keputusan terkait pengungkapan emisi karbon. Sehingga dengan campur tangan pihak manajemen terhadap pengungkapan yang dilakukan diharapkan mampu mengendalikan pelepasan emisi karbon khususnya bagi perusahaan sektor energi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar acuan terkait dengan pengungkapan emisi karbon.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk dapat memberikan informasi tambahan dan mengkaji beberapa topik yang berkaitan dengan masalah/fenomena pada penelitian ini.

1.4 Ruang Lingkup Atau Pembatasan Masalah

Dari banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan emisi karbon di Indonesia, disini peneliti memiliki beberapa pembatasan masalah, yaitu:

1. Objek penelitian hanya terbatas dalam mengukur variabel *Carbon Emission Disclosure* dalam ruang lingkup penelitian pada perusahaan sektor energi serta sektor transportasi & logistik yang terdaftar di BEI.
2. Variabel yang diujikan dalam penelitian ini terbatas dikarenakan hanya mengambil 4 proksi dari total 15 proksi pada *good corporate governance*, 4 proksi tersebut terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dewan komisaris independen serta komite audit.
3. Data dalam penelitian ini diperoleh dari *annual report* serta *sustainability report* masing – masing perusahaan.
4. Periode waktu penelitian selama tiga tahun dari periode 2020 hingga 2022.

1.5 Sistematika Pelaporan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, sistematika penulisan disini berfungsi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait dengan skripsi yang dibuat, berikut sistematika penulisannya:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang masalah penelitian terkait dengan *carbon emission disclosure* dan *good corporate governance*, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup atau pembatasan masalah, dan sistematika pelaporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan uraian tentang landasan teori menurut para ahli yang meliputi teori stakeholder, teori legitimasi serta teori keagenan, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, serta terdapat kerangka pemikiran dan hipotesis dari penelitian yang akan dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisikan uraian tentang penjelasan variabel penelitian, definisi konseptual dan definisi operasional penelitian, populasi, sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan uraian tentang pengujian dan analisis dari hasil temuan yang diperoleh selama penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Berisikan uraian tentang simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang berguna bagi penelitian di masa yang akan datang.